



NOTA DINAS
NOMOR 1/IJ-IND.1/PR/II/2022

Kepada Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan PP39 Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV tahun 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 7 Januari 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV (Oktober-Desember) 2021.

Realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan IV tahun 2021 (Oktober-Desember) 2021 mencapai Rp8.615.665.258,- atau sebesar 31,38% dari pagu anggaran sebesar Rp27.066.374.000,- dengan realisasi fisik sebesar 24,51%. Sehingga realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (Januari-Desember) 2021 mencapai Rp26.672.839.132 atau sebesar 98,54% dari pagu anggaran dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

TRIWULAN IV

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun 2021 juga sebagai informasi atas capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Triwulan IV, untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Januari 2022

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

LILIEK WIDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	4
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	5
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021	5
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	9
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN.....	23
A. Hasil Yang Telah Dicapai.....	23
B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran	23
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	52
D. Langkah Tindak Lanjut	52
BAB IV. PENUTUP	53
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021	5
Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 berdasarkan POK revisi 10.....	6
Tabel 3 Informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ..	11
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021..	19
Tabel 5 Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal	22
Tabel 6 Rekap revisi DIPA Triwulan IV	24
Tabel 7 Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2021	43
Tabel 8 Realisasi kegiatan/output Sekretariat Inspektorat Jenderal	50
Tabel 9 Kegiatan Fisik & Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2021	51

BAB I. PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan tersebut diperlukan adanya dukungan teknis, administrasi, dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
3. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;

4. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal;
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik Negara, dan tata usaha milik Inspektorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan,

dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja) dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Bagian Umum** mempunyai tugas Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional**

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah "Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal", dengan rincian kegiatan pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 Output Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
2.	6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	-
3.	6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-
4.	6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	-
5.	6036.EAL	Layanan Monitoring dan evaluasi Internal	13 Laporan	-
6.	6036.QEC	Bantuan Produk	200 Paket	-

Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mempunyai 6 (enam) output (keluaran) dengan anggaran sebesar Rp27.066.374.000,-. Untuk menghasilkan output tersebut, telah dialokasikan anggaran melalui kegiatan-kegiatan (aktivitas) sebagai berikut:

Tabel 2 Alokasi anggaran dan aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal
Tahun 2021 berdasarkan POK revisi 10

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal		27.066.374.000
6036.EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.750.871.000
6036.EAA.001	Layanan Perkantoran Inspektorat Jenderal		20.750.871.000
001	Gaji dan Tunjangan		15.242.091.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		15.242.091.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5.508.780.000
A	Honorarium Operasional		1.705.834.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		589.970.000
C	Biaya langganan dan operasional perkantoran		1.193.550.000
D	Koordinasi dan layanan pimpinan		1.160.434.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		858.992.000
6036.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	4.439.258.000
6036.EAB.001	Layanan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal		4.439.258.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		732.230.000
A	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022		152.000.000
B	Penyusunan dan Revisi RKAKL Inspektorat Jenderal		2.200.000
C	Penyusunan anggaran 2022		9.000.000
D	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		2.900.000
E	BIMBINGAN DAN PENGAWASAN ASPEK PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		566.130.000
053	Pengelolaan Keuangan		225.520.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		106.720.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN		10.150.000
C	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		9.730.000
D	Penyusunan RKBMN		1.560.000
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		2.200.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		95.160.000
055	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		453.467.000
A	Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum		92.767.000
B	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		2.200.000
C	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja		14.800.000
D	Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor		4.000.000
E	Evaluasi Kelembagaan Internal dan Organisasi Inspektorat Jenderal		2.200.000
F	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian		337.500.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
056	Pengelolaan Kepegawaian		393.124.000
A	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal		130.834.000
B	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal		157.270.000
D	Pelatihan di Kantor Sendiri (In House Training)		39.000.000
E	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		31.000.000
F	Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal		16.600.000
G	Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Itjen		9.400.000
J	Pemantauan dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Itjen		2.200.000
K	Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		6.820.000
057	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		982.496.000
A	Koordinasi dalam rangka penataan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat Jenderal		90.196.000
B	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		33.000.000
C	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		821.140.000
D	Pengembangan Informasi Pengawasan		38.160.000
059	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokoler		162.182.000
A	Pemutakhiran data dan Informasi		11.036.000
B	Penerbitan Masalah Solusi		151.146.000
060	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi		1.490.239.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian		4.926.000
B	Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		16.050.000
C	Penilaian Index Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian		115.490.000
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		110.450.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian		148.788.000
F	Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan		652.650.000
G	Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan		441.885.000
6036.EAD	Layanan Sarana Internal	1 Unit	644.437.000
6036.EAD.01	Layanan Sarana Internal Inspektorat Jenderal		644.437.000
052	Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi		644.437.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		644.437.000
6036.EAK	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	260.380.000
6036.EAK.001	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan		260.380.000

KODE	KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
	Eksternal		
051	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal		260.380.000
A	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut		147.820.000
B	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		110.360.000
C	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		2.200.000
6036.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	371.428.000
6036.EAL.001	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Inspektorat Jenderal		371.428.000
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		135.408.000
A	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja		126.088.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin		1.100.000
C	Penyusunan dan Reviu LAKIN Itjen dan Set Itjen		1.100.000
D	Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon II Itjen		1.760.000
E	Reviu Renstra		4.480.000
F	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		880.000
052	Penyusunan Laporan		236.020.000
A	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		66.160.000
B	Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri		109.200.000
C	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		3.960.000
D	Penyusunan Laporan APIP		3.400.000
E	Fasilitasi Penilaian SAKIP Eselon I		1.100.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		52.200.000
6036.QEC	Bantuan Produk	200 Paket	600.000.000
6036.QEC.001	Bantuan Masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000
051	Pengadaan masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000
A	Pengadaan masker dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM Mikro		600.000.000

B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran program/ kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri;
5. Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif;
6. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel;
7. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
8. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan aktivitas yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Penyusunan Laporan;
4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal;
5. Pengelolaan Data dan Informasi;
6. Pengelolaan Keuangan;
7. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal;
8. Pengelolaan Kepegawaian;
9. Pelayanan Umum dan Perlengkapan;

10. Pelayanan Humas dan Protokoler;
11. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
12. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
13. Gaji dan Tunjangan;
14. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
15. Pengadaan Masker dalam rangka mendukung PPKM Mikro.

Hubungan Sasaran dan Program serta aktivitas Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah disahkan dalam perjanjian kinerja dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3 Informasi kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
1.	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 Laporan	- Koordinasi pemutakhiran data dan informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal	Mengkoordinasi pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal dengan hasil 2 laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II. Hasil temuan eksternal dengan menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,4% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2020
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 Laporan	- Data dan Informasi terkait terkait rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	Mengkoordinasi kegiatan terkait data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan hasil 4 laporan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I-IV 2021 Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	85%	- Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum	Persentase Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal - Forum Rakorwas Koordinasi Data Hasil Pengawasan - Temu Teknis Penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut 	Mengkoordinasi kegiatan terkait pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian Mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih 	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi atau dengan rumus: Jumlah Indeks RB/Jumlah nilai maksimum dalam penilaian RB dikali 100%
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	1 Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penilaian Indeks Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian 	Koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait pelaksanaan penilaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian. Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
3.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal;	Diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian SAKIP Eselon I; - Penyusunan kebijakan pengawasan tahun 2022; - Peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal; - Peningkatan kerja sama SDM pegawai Inspektorat Jenderal JPT dan JFU (Team Building); - Penerbitan Majalah Solusi; - Penilaian SAKIP Eselon I Inspektorat Jenderal; - Penilaian SAKIP eselon II Itjen; - Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja - Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan - Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Laporan Analisis dan evaluasi hasil Pengawasan Tematik - Analisis dan evaluasi hasil pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industry - Penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen - Koordinasi analisis dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan - Reviu Renstra - Penyusunan dan revisi RKAKL Inspektorat Jenderal. 	Dapat diukur dengan berdasar kepada Quality Assurance BPKP, selain itu indikator kinerja tsb memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan; 2. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat; 3. Tingkat Kepatuhan terhadap kode etik auditor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	- Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Jenderal.	- RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ - RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri; - TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun; - TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun. - Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Penyusunan regulasi bidang industri pengolahan nonmigas diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan presiden dalam mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Oleh sebab itu setiap regulasi yang disusun oleh Inspektorat Jenderal diharapkan efektif dan mencapai tujuan dari regulasi tersebut disusun. Efektivitas regulasi yang disusun diukur melalui indikator kinerja yaitu efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: $Er = \frac{SRe}{Ts}$ Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat.
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
				dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; - Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran. 	Indikator kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor; 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk; 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
		Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal; - Koordinasi penyusunan Perjanjian kinerja dan Rencana Kinerja; - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan dan Reviu Perkin. 	Mengkoordinasi kegiatan dalam pelaksanaan PKPT sesuai dengan rencana PKPT. Perhitungan PKPT dilihat dari menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT. Laporan yang dihasilkan adalah laporan Buku PKPT dan Laporan Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT.
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Peta pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal - Analisa Beban Kerja - Penyusunan pengembangan kompetensi di lingkungan Inspektorat Jenderal. 	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	91%	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penilaian reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal - Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian 	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen berdasarkan hasil self assessment

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	74	Perindustrian. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: - Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan - Kepatuhan terhadap regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan - Efisiensi pelaksanaan Kegiatan. 12 Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan - Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.	Nilai IKPA dapat dilihat pada Aplikasi SMART DJA. Cara pengukuran berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. nilai pelaporan keuangan ini memuat: Gaji dan tunjangan rutin bulanan.
8.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%	- Pelatihan di Kantor Sendiri - Pemantauan dan Penilaian kinerja Individu pegawai Itjen; - Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional auditor; - Pemetaan Job Profiling jabatan fungsional umum pegawai Inspektorat Jenderal	Jumlah sharing knowledge/PKS yang diadakan dibandingkan dengan jumlah keikutsertaan diklat substansi pengawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Aktifitas/ Kegiatan	Cara Pengukuran
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan analisa kebutuhan diklat pengembangan kompetensi pegawai Itjen - Assesment kompetensi pegawai Itjen - Koordinasi pelaksanaan diklat dengan BPSDMI - Penilaian Angka Kredit - Evaluasi Prestasi Kinerja Pegawai 	Dihitung dengan membandingkan jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi dengan jumlah keseluruhan APIP di Inspektorat Jenderal.

➤ **Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2021 adalah:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	2 laporan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	4 laporan
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 %
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	4 laporan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB Area Penguatan Pengawasan	71%
		Koordinasi Penilaian Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	1 Kegiatan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	Level 3
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal*)IKU	75%
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang Industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,20
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	70%
		Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	80%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	74
8.	Terwujudnya APIP Yang Profesional Dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Penyelenggaraan PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60%
		Keikutsertaan APIP pada diklat kompetensi/profesi sesuai dengan rencana kebutuhan diklat	75%

*) Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dan *tagging* Sekretariat Inspektorat Jenderal

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan (Output)**

Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Layanan Perkantoran;
2. Tersedianya Layanan Perencanaan & penganggaran Internal;
3. Tersedianya Layanan Sarana Internal;
4. Tersedianya Layanan Pengawasan Internal;
5. Tersedianya Monitoring & Evaluasi Internal;
6. Bantuan Produk.

Tabel 5 Target Keluaran Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	-	-	1 layanan
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	-	-	-	1 layanan
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-	-	-	1 unit
4	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan
5	Layanan Monitoring dan evaluasi Internal	13 Laporan	4	2	2	5 Laporan
6	Bantuan Produk	200 Paket	-	200 paket	-	-

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 (Januari-Desember) 2021 mencapai Rp26.898.466.068,- atau sebesar 99,38% dari pagu anggaran sebesar Rp27.066.374.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% (Berdasarkan Form A).

B. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2021 adalah Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Sampai bulan Desember 2021, hampir semua kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal telah terlaksana sesuai dengan rencana. Kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah terlaksana pada triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan dan perencanaan anggaran tahun 2021 pada triwulan IV dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Revisi Anggaran Inspektorat ke 6 hingga ke 10 Tahun Anggaran 2021. Berikut ini adalah rekap revisi anggaran beserta nilai anggaran yang telah selesai dilakukan revisi selama Triwulan IV:

Tabel 6 Rekap revisi DIPA Triwulan IV

Revisi Ke-	Tanggal	DS - DIPA	Nilai (Rp)	Dasar	Revisi
6	8 Okt 2021	0536-5801-1390-9150	33.282.974.000	Pemenuhan Keutuhan Anggaran Antigen Pegawai ITJEN dan kegiatan Pengawasan oleh Pimpinan	DIPA
7	5 Nov 2021	7048-1493-3744-7629	33.282.974.000	Revisi Perbaikan Akun COVID-19 di ITJEN beserta perbaikan halaman III DIPA	DIPA
8	24 Nov 2021	3310-7012-2170-6970	33.282.974.000	Revisi terkait ketidaksesuaian penggunaan Akun COVID-19 yang sebelumnya telah direalisasikan	DIPA
9	7 Des 2021	3008-0977-5591-7510	33.186.374.000	Revisi Pengalihan Dana Berlebih kepada BPSDMI Untuk Kegiatan Sherpa G20	DIPA
10	23 Des 2021	3008-0977-5591-7510	33.186.374.000	Revisi Pemutakhiran POK Optimalisasi Sisa Anggaran ITJEN Tahun 2021	Pemutakhiran POK

- Penyusunan Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022 dengan progress mencapai 100%;
- Penyusunan konsep dokumen untuk penganggaran Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tahun 2022 berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor B/1441/SJ-IND.1/PR/XI /2021 terkait permohonan data dukung pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada RK-K/L Tahun anggaran 2022;
- Penyiapan rancangan awal rencana kerja Kementerian Perindustrian berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor B/102/SJ-IND/PR/XII/2021 terkait persiapan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 pada unit kerja masing-masing dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan industri baik di tingkat nasional maupun Kementerian.

2. Pengembangan SDM, Pengelolaan Hukum dan Organisasi

Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Finalisasi Pemutakhiran Data Mandiri SAPK Badan Kepegawaian Negara (100% terpenuhi);
- b. Koordinasi terkait peserta Konferensi IIA;
- c. Sosialisasi PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- d. Koordinasi dan Rapat Penilaian Angka Kredit Semester I Tahun 2021;
- e. Revisi SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Gol IV/b-IV/e dan SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sampai dengan Gol IV/a;
- f. Finalisasi Pedoman Audit Kinerja;

- g. Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat dan Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi Pegawai itjen;
- h. Sosialisasi BPJS Kesehatan;
- i. Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Lepas/Kontraktual, Pengemudi dan Pramubakti Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2022;
- j. Sosialisasi TASPEN Smart dari Biro OSDM;
- k. Revisi SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk JFA sampai dengan gol IV/a dan SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk JFA gol IV/a sampai dengan IV/d;

Indikator bagian kepegawaian dalam renstra Sekretariat Inspektorat Jenderal “Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan” selama periode Januari sampai dengan Desember mencapai 64%. Perhitungan capaian diperoleh dari pelaksanaan PKS sebanyak 7 PKS, yaitu

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I;
2. PKS penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020;
3. PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP;
4. PKS Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2021;
5. PKS Overview Manajemen Resiko Indeks;
6. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18;
7. CRMO bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tujuh PKS tersebut dibagi dengan jumlah diklat substansi yang telah dilaksanakan sebanyak 11 diklat substansi yang telah diikuti oleh auditor dan dikali 100%. Diklat substansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I diselenggarakan oleh BKN Tanggal 15 Maret 2021 – 18 Maret 2021;
2. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diselenggarakan Pusdiklat BPKP tanggal 26 April 2021 - 30 April 2021;
3. Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diselenggarakan Pusdiklat BPKP tanggal 7 Juni 2021 – 11 Juni 2021;
4. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18 diselenggarakan oleh BKN Tanggal 21 Juli 2021 – 26 Juli 2021.
5. Diklat Program Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 12 Juli 2021 – 16 Juli 2021;
6. Pelatihan dan Sertifikasi CGAA Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 10 Agustus 2021 – 13 Agustus 2021;
7. Pelatihan dan Sertifikasi CRMO Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP tanggal 10 Agustus 2021 – 13 Agustus 2021;
8. Webinar Risk Management Based On ISO 31000: 2018 diselenggarakan oleh Revolution Mind Indonesia tanggal 13 September 2021;
9. Webinar Professional Risk Management Training Certification diselenggarakan oleh Revolution Mind

Indonesia tanggal 18 September 2021 – 19 September 2021;

10. Seminar Risk Based Auditing diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors tanggal 6 Desember 2021 – 7 Desember 2021;
11. Seminar Root Cause Analysis diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors tanggal 20 Desember 2021 – 21 Desember 2021.

Indikator kinerja lainnya adalah persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat yang dihitung dari periode Januari-Desember 2021 mencapai 76%. Selain itu, indikator lainnya adalah rata-rata indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal yang dihitung berdasarkan Peraturan Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah). Dalam hal ini Inspektorat Jenderal mendapatkan nilai 76,33.

Indikator yang mendukung kinerja Hukum dan Organisasi adalah efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Empat peraturan yang diterapkan adalah

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelemntasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini disahkan pada tanggal 8 Februari 2021, dimana peraturan ini telah digunakan sebagai pedoman

dalam penilaian SAKIP di lingkungan Kementerian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.

- b. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Audit Kinerja Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Keputusan ini disahkan pada tanggal 19 November 2021 dan belum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan ini dinilai kurang efektif dalam penerapannya di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- c. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021, Keputusan Menteri ini disahkan pada tanggal 26 Februari 2021 dan telah digunakan sebagai salah satu pedoman dalam kegiatan pengawasan dan konsultasi oleh Inspektorat Jenderal kepada seluruh Unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan ini telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan/kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian serta sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan dan konsultasi. Peraturan ini dinilai efektif dalam penerapannya di Inspektorat Jenderal.

3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal

Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal merupakan kegiatan administratif yang berpengaruh terhadap kinerja Inspektorat Jenderal dimana hasil realisasi kegiatan ini dapat diperoleh melalui jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi di tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil rapat pimpinan yang dilaksanakan di Triwulan IV tahun 2021, diperoleh kesepakatan bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan diukur berdasarkan data pengawasan yang dilaksanakan pada bulan Januari-Desember tahun 2020. Berdasarkan data yang masuk, diperoleh hasil bahwa dari total rekomendasi 673 data, data yang ditindaklanjuti sebanyak 631. Sesuai rekomendasi 521 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak 110. realisasi rekomendasi sebesar 93,76%.

4. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Dalam rangka mendukung tindak lanjut pengawasan eksternal, telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (verifikasi tahap awal Subbagian PTLHP);
- b. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat dan Vertikal dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dilakukan secara rutin.

Tindak Lanjut BPK per juli mencapai progress 87,55% (penyerahan dokumen TL dari BPK ke bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan per Juli 2021).

Salah satu kegiatan yang menjadi indikator dalam renstra yaitu batas toleransi temuan material pengawasan eksternal telah tercapai sebesar 0,033% (target indikator renstra tercapai) diperoleh dari temuan BPK Rp 653.625.627,60 dibagi realisasi anggaran Kemenperin TA 2020 Rp 1.975.729.108.365.

5. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- a. Monitoring capaian kinerja Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester II Tahun 2021 pada Aplikasi Smart DJA dan E-Monev Bappenas;
- b. Penyelesaian laporan evaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal rutin setiap bulan;
- c. Koordinasi fasilitasi Forum Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan di Hotel Merusaka Bali yang dilakukan secara *Hybrid*. Kegiatan yang dilaksanakan forum diskusi terkait pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2022, penandatanganan “Bali Commitment” oleh eselon I Kementerian Perindustrian, Perilisan Sistem Informasi Pengawasan (SINGA);
- d. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal dan Eselon II dibawahnya;
- e. Revisi Perjanjian Kinerja (Perkin) Inspektorat Jenderal dan Eselon II dibawahnya;
- f. Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2022;
- g. Evaluasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021;

- h. Persiapan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
 - i. Pengisian Rencana Strategis (Renstra) pada aplikasi Intranew untuk mendukung SKP Pegawai.
6. Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan

Kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan yang dilaksanakan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan progress Menindaklanjuti Sosialisasi ttg SHPRBZI yang disampaikan oleh Menpan kepada 31 satker yang diusulkan WBK/WBBM. Dijelaskan mengenai penggunaan aplikasi aplikasi/website SHPRBZI dan kewajiban bagi satker dalam mengisi data responden dan surat-surat yang harus dilengkapi oleh satker;
- b. Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dengan progress Pengisian data Responden oleh Admin satker sudah dilaksanakan dan tinggal memantau pengisian survei oleh responden;
- c. Rapat Persiapan Desk Evaluasi Pembangunan ZI dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan 31 satker yang diusulkan WBK/WBBM dalam menghadapi Desk Evaluasi oleh Menpan. Dalam rapat dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaan desk evaluasi dan ketentuan yang diberikan oleh Menpan;
- d. Desk Evaluasi Pembangunan ZI oleh Menpan. Evaluasi dilaksanakan kepada 31 satker dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Menpan;
- e. Pendampingan Penilaian Kementerian PAN dan RB terkait Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan penguatan pengawasan telah

dilakukan PMPZI ke beberapa satker. Sebanyak 12 satker telah di kunjungi pada bulan November dan 2 satker telah di jadwalkan dikunjungi pada awal desember dari total 31 satker yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM Tahun 2021. Sepuluh satuan kerja Kementerian Perindustrian yang memperoleh predikat WBK/WBBM. Satuan Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK berjumlah 6 (enam) ialah Balai Besar Industri Agro, Balai Diklat Industri Denpasar, Balai Besar Logam dan Mesin, Balai Diklat Industri Jakarta, SMK-SMTI Bandar Lampung, dan Balai Diklat Industri Yogyakarta. Satuan Kerja yang diusulkan mendapat predikat WBBM ada 4 (empat) satker ialah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo, Baristand Industri Samarinda, SMK-SMTI Yogyakarta, dan SMK-SMTI Pontianak;

- f. Mengikuti Rapat Pembahasan *Area of Improvement* (AOI) SPIP Inspektorat Jenderal;
- g. Penyusunan konsep Kebijakan Pengawasan Intern Kemenperin Tahun 2022, Keputusan Menteri Jakwas (Kepmen Nomor 1847 Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022) sudah di tanda tangani oleh Menteri Perindustrian;
- h. Penyusunan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PMPZI Tahun 2021 ke Menteri Perindustrian. Laporan disampaikan berupa Nota Dinas Inspektur Jenderal nomor 476 /IJ-IND/PW/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 yang menjelaskan progres PMPZI sampai bulan November.

7. Pengelolaan Keuangan

Kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan yang rutin setiap bulan;
- b. Pelaporan capaian output ke KPPN;
- c. Koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan;
- d. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- e. Koordinasi dengan Biro Keuangan terkait Sinkronisasi administrasi keuangan dan BMN;
- f. Penyusunan Laporan Perbendaharaan rutin tiap bulan;
- g. Penyusunan Laporan Barang dan Jasa Semester II Tahun 2021.

Indikator Capaian Kinerja pada bagian keuangan adalah capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal periode Januari-Desember 2021 yang dilihat dari gaji dan tunjangan sebesar memperoleh nilai 75,71.

8. Pelayanan Umum

Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendukung tercapainya kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal. Indikator yang diukur pada capaian kinerja terkait pelayanan umum adalah persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Inspektorat Jenderal dihitung dari perbandingan pagu dan realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2021

diperoleh hasil 93,97%. Indikator lainnya adalah tingkat dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dihitung melalui survei yang diisi oleh pegawai Inspektorat Jenderal. Sampai saat ini survei tersebut masih dalam proses penilaian dan menunggu hasil. Hasil laporan survei akan dijelaskan pada Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2021.

9. Pelaksanaan PKPT Triwulan IV

PKPT merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

PKPT yang dijadikan dasar dalam penyusunan evaluasi ini adalah PKPT awal yang diserahkan oleh masing-masing Inspektorat pada akhir tahun 2020. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan pada masing-masing Inspektorat belum sesuai dengan perencanaan atau PKPT awal, masih terdapat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan *timeframe* dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tidak dicantumkan dalam PKPT.

Pada awal semester II, Kegiatan Inspektorat I yang sesuai dengan dokumen PKPT ialah Reviu LK-BMN Setjen yang mulai dilakukan di pertengahan bulan Juli sampai dengan bulan agustus 2021. Kegiatan lain yang telah dijadwalkan seperti Reviu RKA-K/L BPSDMI dan Audit Poltek Morowali tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kegiatan lainnya adalah kegiatan Non PKPT (kegiatan sesuai arahan dari pimpinan) pengawasan dan pengawalan Implementasi Instruksi Menteri No 1 tahun 2021 dan pelaksanaan Desk Reviu kegiatan beresiko (konstruksi, mesin/peralatan, diklat 3 in 1,

pengadaan tanah dan jasa konsultasi). Sedangkan di bulan Agustus, Kegiatan yang sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan adalah reuiu LKBMN BPSDMI. Kegiatan yang direncanakan, namun tidak terealisasi adalah penilaian MRI yang rencananya akan dilaksanakan di bulan berikutnya. Kegiatan Non PKPT yang dilaksanakan adalah pengawasan progress pembangunan gedung AKOM Solo, reuiu revisi anggaran pada BPSDMI dan peran APIP K/L dalam pengawasan atas perencanaan dan penganggaran. Kegiatan Inspektorat I di bulan September adalah melanjutkan kegiatan pengawasan yang dilakukan di bulan selanjutnya. Selain itu juga terlaksana kegiatan non PKPT seperti monitoring bantuan masker pada BPSDMI, mengikuti layanan konsultasi (Coaching Clinic secara online), pengawasan seleksi tes CPNS di Lingkungan Kemenperin. Kegiatan Inspektorat I sesuai PKPT ialah reuiu RKA-K/L Sekretariat Jenderal dan BPSDMI dan reuiu RKBMN 2023 Setjen dan BPSDMI. Namun kegiatan yang dilaksanakan di bulan oktober ialah Reuiu usulan DIPA TA 2021 pada Sekretariat Jenderal, Reuiu Perencanaan Program dan Anggaran TA 2021 pada BPSDMI, Buka Blokir Anggaran Tahun 2021 pada Biro Umum, Reuiu Pergeseran Anggaran pada BPSDMI Jakarta dan Reuiu Usulan Revisi DIPA TA 2021 pada Sekretariat Jenderal. Di bulan November, Kegiatan yang direncanakan Inspektorat I ialah Audit BPSDMI. Kegiatan tersebut dilaksanakan di bulan November diikuti dengan kegiatan Non PKPT lainnya, yaitu Studi Banding Sistem Informasi di Politeknik STTT Bandung, Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung PIDI 4.0 di Permata Hijau, Uji Fisik Audit Pekerjaan Pembangunan Gedung Politeknik APP Jakarta dan Pendampingan pelaksanaan penilaian eksternal WBK/WBBM pada SMK/SMTI Yogyakarta dan BDI Yogyakarta. Rencana kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat I di bulan

Desember adalah Audit BPSDMI. Uji Fisik Proyek Pembangunan Satker BPSDMI.

Kegiatan pengawasan Inspektorat II di semester II ini yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan di dokumen PKPT adalah audit Dana dekonsentrasi dan Reviu LK-BMN Ditjen ILMATE dan IKMA. Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai adalah Reviu RKA-K/L dan kegiatan Non PKPT seperti pengawasan pelaksanaan IOMKI dan pemenuhan kebutuhan oksigen pada masa PPKM darurat, Pengawasan ketersediaan oksigen medis dan kegiatan-kegiatan sesuai arahan pimpinan lainnya. Sedangkan di bulan agustus, kegiatan yang direncanakan di PKPT sama seperti yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan yang direncanakan di PKPT tetapi juga kegiatan lain seperti pengawasan pengadaan CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Kemenperin, Penyelesaian Permohonan Tanggapan Terhadap Draft Perjanjian Hibah CEIR, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Dekonsentrasi Pada Disperindag Provinsi NTT, Koordinasi Pemantauan IOMKI dan Evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu pada PT Krakatau Steel dan keikutsertaan dalam rapat-rapat terkait kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan Inspektorat II di bulan September sama dengan kegiatan Inspektorat I yaitu melanjutkan kegiatan pengawasan di bulan sebelumnya. Kegiatan pengawasan Inspektorat II di bulan Oktober yang direncanakan dalam PKPT ialah Reviu RKA-KL Pagu Definitif, Reviu RKBMN dan pendampingan. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan di bulan Oktober dan kegiatan Non PKPT Lainnya juga dilaksanakan seperti Evaluasi BMDTP, sosialisasi aplikasi Monev DAK, menghadiri rapat terkait pengawasan dan kegiatan lainnya yang telah dijelaskan diatas. Kegiatan Inspektorat II di bulan November 2021 yang

telah direncanakan di PKPT ialah masih melanjutkan kegiatan-kegiatan di bulan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan Inspektorat II di Bulan Desember adalah Kegiatan Non PKPT seperti Pendampingan Persiapan ZI menuju WBBM pada BPIPI Sidoarjo, Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan dana Dekonsentrasi Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi D.I Yogyakarta, Forum Group Discussion Evaluasi Capaian Rencana Aksi Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Tahun 2021, Koordinasi Pelaksanaan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, Koordinasi Program Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022, Permintaan Keterangan Ahli atas Hasil Uji Masker Kain di Balai Besar Tekstil Bandung.

Kegiatan Inspektorat III pada bulan Juli yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal PKPT adalah Reviu RKA-K/L dan Reviu LK-BMN Satker Cakupan tugas IR III. Reviu RKA-K/L yang dilaksanakan terkait pemotongan anggaran dalam rangka pemberian bantuan oksigen, tabung oksigen, Isotank, Oksigen Konsentrator dan oksigen generator serta Program Pengendalian IMEI Nasional BSKJI (Beserta Unit Vertikalnya), Itjen dan Pusdatin. Kegiatan Reviu RK-BMN yang seharusnya juga dilaksanakan di bulan Juli, sebagian telah dilaksanakan di bulan Juni. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan non PKPT (Sesuai arahan pimpinan) seperti Monitoring dan pengawalan implementasi IOMKI pada satker Pusdatin, Pengawasan dan Pengawalan pada perusahaan Industri dalam rangka pemantauan Implementasi Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2021 guna penyediaan bantuan oksigen dalam masa kedaruratan Covid-19, dsb. Sedangkan kegiatan Inspektorat III dibulan agustus yang sesuai dengan rencana PKPT adalah kegiatan pengawalan yang

dilaksanakan terkait Implementasi IOMKI pada Satker BSKJI dan Pusdatin, pengawalan SPPT-SNI pada unit pelaksana teknis BSKJI. Kegiatan lain yang terlaksana tidak sesuai dengan PKPT, yaitu Reviu RKA-KL pagu indikatif 2022 Inspektorat Jenderal dan Reviu LKBMN Semester I TA 2021 pada BSI, BBKK, BBIA, Baristand Padang, Baristand Bandar Lampung, BBIHP Makassar, Baristand Medan, Baristand Samarinda, Baristand Ambon dan Baristand Manado. Kegiatan pengawasan Inspektorat III di bulan September di dokumen PKPT adalah kegiatan Pengawalan dan Consulting satker cakupan tugas Inspektorat III. Kegiatan pengawasan di bulan September telah sesuai dengan PKPT. Kegiatan Inspektorat III yang direncanakan di PKPT bulan oktober adalah Reviu RKA-KL Pagu Alokasi dan reviu RKBMN. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana PKPT dan juga kegiatan lainnya seperti audit program dan kegiatan serta kegiatan pendampingan pimpinan. Kegiatan yang direncanakan di PKPT oleh Inspektorat III di bulan November ialah Audit BSI, Audit Pusdatin dan Audit BSKJI Pusat. Kegiatan yang terlaksana ialah Pengawalan kegiatan beresiko tinggi, pendampingan pimpinan dan kegiatan Non PKPT ikut serta dalam Forum Rapat Koordinasi pengawasan. Kegiatan Inspektorat III di bulan Desember adalah Audit Pengadaan Bantuan 200.000 Masker di Komando Daerah Militer Iskandar Muda Banda Aceh, Pengawalan Program dan Kegiatan Beresiko Tinggi TA 2021 Pada Satker Baristand Industri Ambon, Melaksanakan Cek Fisik Dalam Rangka Audit Kewajaran Harga Masker Pada PT Nirwana Alabare Garmen, Melaksanakan Pengawalan Kegiatan Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas.

PKPT Inspektorat IV pada bulan Juli 2021 yang sesuai dengan jadwal PKPT yang telah direncanakan adalah Reviu LK Ditjen IA, IKFT dan KPAIL, Reviu Laporan Keuangan dan BMN

Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kegiatan yang telah direncanakan di bulan Juli seperti pemutakhiran peta resiko 2021 dan pendampingan penyusunan peta risiko satker cakupan tugas IR IV tidak dilaksanakan. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan di bulan Juli adalah Reviu revisi realokasi pagu TA 2021 Ditjen KPAIL, Reviu RKA-K/L Ditjen IA dan Ditjen KPAIL, Reviu Usulan RKA-K/L berdasarkan Pagu Indikatif TA 2020 Pusat P3DN dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal. Kegiatan lainnya adalah kegiatan non PKPT seperti Pengawasan dan pengawalan Industri Oxygen Kesehatan Covid-19, Pengawalan penerbitan dan pelaksanaan IOMKI serta penyediaan oksigen medis selama PPKM darurat pada satker cakupan tugas Inspektorat IV, Pemantauan vaksinasi Industri dan implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) Ditjen Industri Agro. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat IV di bulan Agustus 2021 yang sesuai dengan rencana PKPT ialah kegiatan reviu revisi DIPA dan kegiatan pengawalan. Kegiatan lain yang terlaksana ialah kegiatan Non PKPT seperti Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan mesin dan/atau peralatan pembuatan obat tradisional (hibah mesin/peralatan dalam rangka revitalisasi industri obat tradisional TA 2020), Pemantauan Implementasi penerapan SE Menperin No 3 Tahun 2021 (IOMKI) dan kesiapan Industri menghadapi Pandemi Ditjen Industri Agro di PT Sampoerna. Kegiatan pengawasan Inspektorat IV di bulan September 2021 menurut PKPT adalah audit kinerja Pusat P3DN, Audit kegiatan beresiko tinggi 2021 dan Audit reviu pagu alokasi 2022. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di bulan September 2021 sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan Inspektorat IV sesuai dengan PKPT. Kegiatan lain yang terlaksana ialah kegiatan Non PKPT. Kegiatan tersebut adalah Pengawalan

program restrukturisasi mesin/peralatan pada industry penyempurnaan kain dan industri percetakan kain sesuai permenperin no 18 tahun 2021, Penilaian Kembali BMN di pabrik gula PT Perkebunan Nusantara II Deli Serdang, Pengawasan dan pelaksanaan program kegiatan Direktorat ASDIPI Tahun 2021, Pengawasan pemetaan kebutuhan garam industry selain dari impor, Pengawasan verifikasi kebutuhan bahan baku jagung dalam industry makanan, Penyusunan RSNI Sistem Harmonisasi Global Ditjen IKFT, Penilaian BMN PMPP Ditjen Industri Agro di Takalar Sulsel. Kegiatan pengawasan Inspektorat IV yang direncanakan pada PKPT di bulan oktober ialah kegiatan Reviu Pagu Alokasi, Reviu LK Triwulan III, pengawasan kegiatan berisiko tinggi. Reviu Pagu alokasi/reviu revisi anggaran terlaksana di bulan oktober. Namun kegiatan yang sesuai PKPT lainnya tidak terlaksananya di bulan oktober. Kegiatan yang terlaksana lainnya ialah kegiatan seperti survey lapangan perusahaan peserta Hannover Messe, Audit Kinerja Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional TA 2020, Reviu Usulan RKA-K/L Ditjen IKAFT Berdasarkan Pagu Alokasi TA 2022, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara kementerian Perindustrian TA 2023, Reviu RKA-K/L PPIH TA 2022, Reviu Usulan RKAKL Pusat Tahun 2022 Pusat P3DN dan kegiatan Non PKPT lainnya. Di bulan November kegiatan yang direncanakan Inspektorat IV di bulan November ialah pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan consulting. Kegiatan yang dilaksanakan ialah kegiatan pengawasan, sampling audit dan pengujian lapangan. Kegiatan Inspektorat IV dibulan Desember adalah Sampling Audit BMDTP Sektor Industri Agro dan IKFT Tahun 2021 Gresik dan Surabaya, Reviu revisi DIPA dalam rangka Realokasi Ditjen IKFT, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Dialog dan Kunjungan Kerja Dalam Rangka Optimalisasi Peningkatan Daya Saing Industri Kaca Serta Persiapan Pemberlakuan SNI Kaca Isolasi Secara Wajib, Pengawasan Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Daya Saing Industri Keramik, Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Sektor Industri Agro dan IKFT Tahun Anggaran 2021, Reviu revisi DIPA dalam rangka Realokasi Ditjen IKFT, Reviu Revisi DIPA Ke 9 Ditjen KPAII Tahun 2021, Reviu revisi DIPA Ditjen Industri Agro, Reviu Revisi DIPA Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Penyelenggaraan Indonesia Halal Award (IHYA) pada Pusat PIH TA 2021, Pengawasan Kegiatan Persiapan Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023, Pengawasan Kegiatan Pra Pleno RKA RPP Perwilayahan Industri Ditjen KPAII, Pengawasan Kegiatan Penyusunan Business Plan Industri Pro Vitamin A Berbasis Sawit dan Bahan Alam Lainnya Ditjen Industri Agro, Reviu Kewajaran Harga Dalam Rangka Pengadaan Masker, Pengawasan Kegiatan Rakor Timnas P3DN, Pengawasan Kegiatan Sinergitas program Ditjen KPAII, Mengikuti Kegiatan PAF Online Inovasi Auditor Internal Publik Dalam Era Disrupsi, Mengikuti Kegiatan PAF Online Inovasi Auditor Internal Publik Dalam Era Disrupsi, Pengawasan Kegiatan FGD Pengembangan dan pemanfaatan Fitofarmaka Ditjen IKFT, dan kegiatan Non PKPT lainnya.

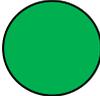
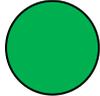
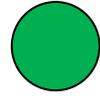
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen PKPT, sebagian besar dari segi waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi serta juga disesuaikan dengan arahan dari pimpinan masing-masing eselon II Inspektorat Jenderal.

Tabel 7 Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan unit kerja pusat dan vertikal dalam rangka penyelesaian tindak lanjut saldo temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, penyerahan dokumen dari BPK per Juli 2021, tindak lanjut mencapai 87,55%; - Kegiatan Audit maupun reviu LK-BMN yang dilaksanakan sampai TW IV oleh masing-masing Inspektorat sebagian besar telah sesuai dengan PKPT yang direncanakan di awal tahun; - Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi telah dilaksanakan oleh pimpinan masing-masing eselon II di TW IV; - BPK telah Me-release hasil pemeriksaan pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Laporan Nomor 7b/LHP/XV/05/2021; - Capaian batas toleransi material sebesar 0,033%, telah memenuhi target yang ditetapkan. Perhitungan pemeriksaan tersebut diperoleh dari temuan BPK Rp 653.625.627,60 dibagi realisasi anggaran Kemenperin TA 2020 Rp 1.975.729.108.365; - Selain itu dihasilkan 2 Laporan, yaitu Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK Semester I dan II. 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	Jumlah total Rekomendasi: 960 Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti belum ada (0) . Laporan yang dihasilkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I s/d IV 2021.	
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian; - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan. 	Berdasarkan Laporan Klinik, Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2021, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 319 kali pengaduan, diantaranya 1 kali berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti baik yang tidak berkadar pengawasan maupun yang berkadar pengawasan (100%) .	
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut 	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2020. Dari total rekomendasi 673 data, data yang ditindaklanjuti sebanyak 631. Sesuai rekomendasi 521 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak. Capaian rekomendasi sebesar $631/673 \times 100\% = \mathbf{93,76}$. Laporan yang dihasilkan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Triwulan I s/d IV 2021.	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Forum komunikasi PMPRB - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Mandiri PMPRB, telah dilaksanakan Panel I-III penilaian mandiri PMPRB telah dilaksanakan di TW II. - Hasil PMPRB telah diperoleh indikator kinerja telah tercapai, Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB (5.61/6.25)*100%=89.76% - Kegiatan Penilaian PMPZI Tahun 2021 sampai dengan rapat pleno hasil PMPZI. Hasil rapat pleno mengusulkan 31 satker (14 diusulkan WBBM dan 17 diusulkan WBK). - Kegiatan Penyusunan Berita Acara dan Laporan kegiatan penilaian ZI tahun 2021 masih dalam proses penyusunan. - Survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan Zona Integritas. 	
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Koordinasi dan sosialisasi penilaian MRI dengan melakukan pemetaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian	Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2020-2021 Nomor B/738/SJ-IND/KU/XI/2021 tanggal 26 November 2021. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,620. Kegiatan Koordinasi penilaian Indeks Manajemen Risiko telah selesai dilaksanakan.	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat 	Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden(auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal sebesar 87,5% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan B	
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu LAKIP - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Penilaian SAKIP Eselon II - Pra evaluasi SAKIP ITJEN - Penilaian SAKIP Es I Kemenperin 	Berdasarkan laporan hasil bimbingan teknis BPKP Nomor LBINAPIP-104/D1/04/1/2021 tanggal 17 Desember 2021, kapabilitas APIP Kemenperin telah mencapai Level 3 dengan catatan	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan Pagu dan realisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal $5.672.525.696/6.036.263.000*100\%=$ 93,97% 	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penghitungan efektivitas regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal	Terdapat 4 Peraturan bidang industri yang menjadi pedoman di Inspektorat Jenderal. Namun Hanya 3 peraturan yang diterapkan. Sehingga capaian efektivitas regulasi yang diterapkan mencapai 75% . Peraturan yang diterapkan adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Impelemntasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	- Sudah dilaksanakan di Triwulan II	Hasil Penilaian SAKIP Eselon I Tahun 2020 yang telah dilaksanakan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 80,1	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan - Penyusunan Jakwas Tahun 2022 - Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan setiap Inspektorat pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Seluruh kegiatan pengawasan yang meliputi audit, pengawalan, reviu dan kegiatan Non PKPT lainnya (sesuai arahan pimpinan) seluruhnya dapat terlaksana. Sehingga capaian untuk indikator ini mencapai 100%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan sesuai dengan penugasan SDM sesuai perannya di masing-masing Inspektorat. Berdasarkan Laporan Bagian Kepegawaian, Kesesuaian Peran pengawasan Auditor dengan sertifikasi terakhir yang dimiliki telah sesuai 100%	
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	- Survey tingkat dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	Capaian Indikator ini dihitung dari hasil survei kepuasan pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal yang dijalankan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Sebanyak 75% responden yang mengikuti penilaian, merasakan puas akan pelayanan dukungan manajemen yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal	
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	- Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen telah mencapai target, yaitu 91% Cara hitung: nilai RB Itjen (komponen pengungkit) = 33,03 dari total nilai 36,3. maka: $33,02/36,3 = 0,91 \times 100\% = 91\%$	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	- Penilaian IKPA Inspektorat Jenderal	Nilai Pelaporan Keuangan yang diperoleh dan dapat dilihat di Aplikasi Smart DJA periode Januari-Desember 2021 yang memuat gaji dan tunjangan, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 75,71	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana pelaksanaan Program/Kegiatan TW IV	Capaian TW IV	Keterangan
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	- Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).	Indikator ini adalah indikator baru sehingga pada saat dilakukan penilaian rata-rata, hanya 1 (satu) unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang diwakili oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal Jumlah Total nilai pegawai 1832 dibagi jumlah pegawai 24 = 76,33	
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	- PKS atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	PKS yang telah dilaksanakan adalah 7 Pelatihan (Januari-September), diklat substansi yg telah diikutsertakan 11. Maka Capaian hingga September 2021: $7/11 \times 100\% = 64\%$ 7 PKS, yaitu Penilaian Mandiri SPIP/MRI, PKS penilaian SAKIP tahun 2020, PKS Standarisasi hasil penilaian SAKIP, PKS Overview Manajemen Resiko Indeks, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan I, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis MASN Angkatan 18, CRMO bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- Koordinasi Pengembangan SDM - Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor - Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	Hingga Desember 2021, Jumlah APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sebanyak 81 orang dibagi dengan jumlah keseluruhan pegawai Itjen 104 orang dikali 100% = 77,88% .	

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat masih banyak kinerja yang belum menggambarkan pencapaian target kinerja, dikarenakan pengukuran baru dapat dilakukan setelah semua unsur-unsur pengukuran terpenuhi.

Tabel 8 Realisasi kegiatan/output Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	REALISASI	TW II	REALISASI	TW III	REALISASI	TW IV	REALISASI
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Layanan Sarana Internal	1 Unit	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Layanan Pengawasan Internal	2 Laporan	0	0	1	1	0	0	1	1
5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	4	4	2	2	2	2	5	5
6	Bantuan Produk	200 Paket	0	0	200	200	0	0	0	0

Sedangkan pencapaian keluaran dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal secara rinci dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 9 Kegiatan Fisik & Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2021

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan IV			s/d Triwulan IV			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	%	J u m l a h (Rp)	%
Layanan Perkantoran	20.750.871.000	27	6.323.958.838	30,48	100	20.582.274.636	99,19	168.596.364	0,81
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.439.258.000	41,41	2.052.723.200	46,24	100	4.254.538.109	95,84	184.719.891	4,16
Layanan Sarana Internal	644.437.000	45	56.804.000	8,81	100	644.348.980	99,99	88.020	0,01
Layanan Pengawasan Internal	260.380.000	29,97	68.356.468	26,25	100	251.769.560	96,69	8.610.440	3,31
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	371.428.000	28,21	113.822.752	30,64	100	339.907.847	91,51	31.520.153	8,49
Bantuan Produk	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	100	0	0
TOTAL	27.066.374.000	24,51	8.615.665.258	31,83	100	26.672.839.132	98,54	393.534.868	1,45

C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada triwulan IV hampir seluruhnya telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun, masih ditemukan kegiatan yang belum sesuai dengan target Renstra Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan di tahun 2021. Ada hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Adanya aturan baru dalam menilai Maturitas SPIP, menjadikan unsur-unsur yang dinilai berbeda dengan peraturan sebelumnya, selain itu batas waktu penilaian yang diberikan terlalu singkat sehingga capaian Indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) tidak tercapai;

D. Langkah Tindak Lanjut

Upaya dan langkah tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut, diharapkan Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dapat dilaksanakan lebih awal di tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2021 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Pada Triwulan IV capaian fisik mencapai 24,51% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp8.615.665.258,- atau 31,83% dari pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp27.066.374.000,-.

Pada Triwulan IV diharapkan seluruh kegiatan dapat selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu koordinasi seluruh pihak terkait agar kegiatan dapat berjalan dengan maksimal.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal periode Triwulan IV Tahun 2021, untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	2 Laporan	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	4 Laporan	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	85%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	4 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pe mutakhiran Data Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pe mutakhiran Data Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/p emutakhiran Data Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	71%	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Forum komunikasi PMPRB - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi EHP)
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	1 Kegiatan	-	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal -Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri -Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	75%	-	-	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Evaluasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	-Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 -Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP -Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN	IACM Level 3	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra	- Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Penilaian SAKIP Eselon II - -Pra evaluasi SAKIP ITJEN	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	- Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal*)IKU	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal	75%	-	-	-	- Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
5.	Tersedianya regulasi pembangunan industry yang efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penerapan regulasi yang dijadikan sampel di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	-	-	-	- Penghitungan efektivitas regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian, Hukum dan Organisasi
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	- Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian, dilakukan penilaian terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.	78,2	-	- Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian	-	-	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (TLHP dan EHP)
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan	80%	- Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Evaluasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL				aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL		
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	90%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	- Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; - Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran.	70%	-	-	-	- Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; - Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP	91%	-Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri -Penyusunan Laporan APIP	- Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP	- Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	-Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; -Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyampaian LPJ	74				-Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; -Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.					Uang Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.		
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	- Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	71	-	-	-	Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	PKS	60%	PKS	PKS	PKS	PKS	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN -Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN -Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor -Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN -Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

Rencana Aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan /pengawalan kegiatan berisiko tinggi	2 Laporan	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan /pengawalan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan /pengawalan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan /pengawalan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan /pengawalan kegiatan berisiko tinggi	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)
		Koordinasi data rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL	4 Laporan	- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	85%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis
		Pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	4 Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	71%	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	-Forum komunikasi PMPRB -Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	- Forum komunikasi PMPRB - Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	- Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian - Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (Koordinasi EHP)
		Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	1 Kegiatan	-	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	- Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Keuangan
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal -Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri -Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	75%	-	-	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	- Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal - Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri - Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Evaluasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN -Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 -Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP -Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pra evaluasi SAKIP ITJEN 	IACM Level 3	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja - Reviu Perkin dan Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN & SET ITJEN - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Penilaian SAKIP Eselon II -Pra evaluasi SAKIP ITJEN 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Reviu Perkin dan Renstra - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3 - Penyusunan / Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu ISO dan SOP-AP - Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal*)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal 	75%	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
5.	Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penerapan regulasi yang dijadikan sampel di lingkungan Inspektorat Jenderal	74%	-	-	-	- Penghitungan efektivitas regulasi di lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian , Hukum dan Organisasi
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	- Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian, dilakukan penilaian terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.	78,2	-	- Penilaian SAKIP Unit Eselon I Kementerian Perindustrian	-	-	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Arsiparis (TLHP dan EHP)
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal	80%	- Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi	- Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Program dan Evaluasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			-Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL		Hasil Evaluasi Triwulanan	Hasil Evaluasi Triwulanan	Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan -Reviu RKA-KL		
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	90%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	- Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; - Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran.	70%	-	-	-	- Tersedianya Sistem Informasi yang dapat dipergunakan oleh Auditor; - Pemenuhan data/informasi yang diberikan dari jumlah permintaan data yang masuk; - Layanan Perkantoran yang diberikan satu tahun anggaran.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Umum

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik - Penyusunan Laporan APIP 	91%	<ul style="list-style-type: none"> -Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri -Penyusunan Laporan APIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian SAKIP Eselon I - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik -Penyusunan Laporan APIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan - Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri - Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; - Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, 	74				<ul style="list-style-type: none"> - Indikator IKPA diantaranya: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Retur SP2D, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan; - Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
			Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.					Persediaan, Penyampaian LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Kesalahan SPM, Perencanaan Kas.		
8.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	- Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	71	-	-	-	Pengukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian
		<i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	PKS	60%	PKS	PKS	PKS	PKS	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN -Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor -Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM - Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN - Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal - Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN - Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN -Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor -Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pengembangan SDM -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN -Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN -Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021 -Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal -Koordinasi Pembinaan Kepegawaian 	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Koordinator Kepegawaian

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

I. DATA UMUM

- | | |
|--|---|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
04. Ekonomi
04.07. Industri Dan Konstruksi
04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
:
: 6036 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal
1/1
Ir. Liliek Widodo, MSi
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 4
SP DIPA- 019.06.1.247885/2021 |
|--|---|

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EAA Layanan Perkantoran		-	20,750,871	20,750,871		1 Layanan
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		-	3,953,973	3,953,973		1 Layanan
EAD Layanan Sarana Internal		-	644,437	644,437		1 unit
EAK Layanan Pengawasan Internal		-	260,380	260,380		2 Laporan
EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		-	371,428	371,428		13 Laporan
Total		-	25,981,089	25,981,089		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EAA Layanan Perkantoran	75.16	66.50	46.00	73.00	25.05	29.96	25.00	27.00	100.00	99.19	100.00	100.00	DKI JAKARTA
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	82.15	55.42	44.45	58.59	25.00	25.00	25.00	41.41	100.00	99.00	100.00	100.00	DKI JAKARTA
EAD Layanan Sarana Internal	100.48	91.17	55.00	55.00	25.00	25.00	25.00	45.00	100.00	99.99	100.00	100.00	DKI JAKARTA
EAK Layanan Pengawasan Internal	89.39	70.44	40.05	70.03	25.00	18.29	25.00	29.97	100.00	98.80	100.00	100.00	DKI JAKARTA
EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	74.77	63.11	59.34	71.79	25.23	20.16	25.00	28.21	100.00	99.35	100.00	100.00	DKI JAKARTA
QEC Bantuan Produk	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DKI JAKARTA
Jumlah	76.99	65.42	44.75	68.95	23.50	30.75	48.71	24.51	100.00	99.38	100.00	100.00	



Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Setitjen TA 2021

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.c. Biaya Langganan Dan Operasional Perkantoran	1.193.550.000	100,14%	99,79%	100,00%	100,00%
2.	6036.EAA - 6036.eaa.001.001.a. Gaji Dan Tunjangan	15.242.091.000	100,29%	99,74%	100,00%	100,00%
3.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.a. Honorarium Operasional	1.705.834.000	105,94%	99,98%	100,00%	100,00%
4.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.b. Persediaan Dan Perlengkapan Kantor	589.970.000	101,53%	97,12%	100,00%	100,00%
5.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.e. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor	858.992.000	100,47%	99,75%	100,00%	100,00%
6.	6036.EAA - 6036.eaa.001.002.d. Koordinasi Dan Layanan Pimpinan	1.160.434.000	90,00%	99,93%	100,00%	100,00%
7.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. C. Pelayanan Umum Dan Rapat Kedinasan	777.740.000	105,58%	106,14%	100,00%	100,00%
8.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. B. Penataan Dan Penghapusan Arsip/dokumen Pengawasan Dari Arsip Inaktif	33.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	6036.EAB - 6036.eab.001.057. A. Koordinasi Dalam Rangka Penataan Ketatausahaan Dan Kearsipan Inspektorat Jenderal	90.196.000	100,00%	99,72%	100,00%	100,00%
10.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.k. Fasilitas Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun Pns Inspektorat Jenderal	6.820.000	100,00%	96,68%	100,00%	100,00%
11.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.j. Pemantauan Dan Penilaian Kinerja Individu Pegawai Itjen	2.200.000	100,00%	99,45%	96,00%	96,00%
12.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.g. Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Pegawai Itjen	9.400.000	100,00%	99,91%	100,00%	100,00%
13.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.f. Penyusunan Peta Pengembangan Kompetensi Sdm Inspektorat Jenderal	16.600.000	100,00%	94,53%	99,00%	99,00%
14.	6036.EAB - 6036.eab.001.057.d. Pengembangan Informasi Pengawasan	38.160.000	115,72%	100,66%	100,00%	100,00%
15.	6036.EAB - 6036.eab.001.059. A. Pemutakhiran Data Dan Informasi	11.036.000	100,00%	98,88%	100,00%	100,00%
16.	6036.EAB - 6036.eab.001.059. B. Penerbitanmajalah Solusi	151.146.000	100,90%	97,60%	100,00%	100,00%
17.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. A. Pelaksanaan Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	4.926.000	465,41%	98,05%	100,00%	100,00%
18.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. B. Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	16.050.000	100,00%	24,98%	100,00%	100,00%
19.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. C. Penilaian Index Manajemen Risiko (mri) Kementerian Perindustrian	115.490.000	100,00%	78,11%	99,00%	99,00%
20.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. D. Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian(pmprb)	110.450.000	109,24%	95,82%	100,00%	100,00%

21.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. E. Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas Dalam Rangka Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih	148.788.000	100,00%	97,58%	100,00%	100,00%
22.	6036.EAB - 6036.eab.001.060. F. Pembinaan Dan Pengawasan Pimpinan	652.650.000	100,00%	98,60%	0,00%	0,00%
23.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.e. Reviu Rk Bmn	2.200.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
24.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.e. Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	31.000.000	100,00%	99,97%	100,00%	100,00%
25.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.d. Pelatihan Di Kantor Sendiri (in-house Training)	39.000.000	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%
26.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.b. Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Jenderal	157.270.000	100,00%	99,60%	100,00%	100,00%
27.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.c. Fasilitasi Reviu Rkaki	9.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.d. Penyusunan Pkpt Inspektorat Jenderal	2.900.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29.	6036.EAB - 6036.eab.001.051. A. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2022	152.000.000	100,00%	90,06%	100,00%	100,00%
30.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.e. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Program Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	566.130.000	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%
31.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.a. Pelayanan Perbendaharaan	106.720.000	100,00%	99,80%	100,00%	100,00%
32.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan Dan Bmn	10.150.000	100,00%	99,69%	100,00%	100,00%
33.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.c. Penyusunan Laporan Keuangan Dan Bmn	9.730.000	100,00%	99,94%	100,00%	100,00%
34.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.d. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	1.560.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35.	6036.EAB - 6036.eab.001.053.f. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Keuangan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	95.160.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
36.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.a. Pengelolaan Pelayanan, Bantuan Dan Konsultasi Hukum	92.767.000	100,00%	99,33%	100,00%	100,00%
37.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.b. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	2.200.000	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
38.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.c. Penyusunan Analisa Jabatan Dan Analisa Beban Kerja	14.800.000	100,00%	98,93%	100,00%	100,00%
39.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.d. Internalisasi Penerapan Kode Etik Auditor	4.000.000	100,00%	55,00%	100,00%	100,00%
40.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.e. Evaluasi Kelembagaan Internal Dan Organisasi Inspektorat Jenderal	2.200.000	100,00%	99,64%	100,00%	100,00%
41.	6036.EAB - 6036.eab.001.055.f. Pembinaan Dan Pengawasan Aspek Kepegawaian Dan Tata Laksana Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	337.500.000	100,00%	99,99%	0,00%	0,00%
42.	6036.EAB - 6036.eab.001.056.a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Jenderal	130.834.000	100,00%	96,41%	100,00%	100,00%
43.	6036.EAB - 6036.eab.001.051.b. Penyusunan Dan Revisi Rkaki Inspektorat Jenderal	2.200.000	196,50%	100,00%	100,00%	100,00%
44.	6036.EAD - 6036.ead.001.052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	644.437.000	100,48%	99,99%	0,00%	0,00%
45.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. A. Koordinasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	147.820.000	100,00%	95,20%	100,00%	100,00%
46.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. B. Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	110.360.000	100,00%	98,66%	100,00%	100,00%
47.	6036.EAK - 6036.eak.001.051. C. Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi Dan Reviu Inspektorat Jenderal	2.200.000	100,00%	98,64%	100,00%	100,00%
48.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. A. Koordinasi	126.088.000	100,00%	86,51%	100,00%	100,00%

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja						
49.	6036.EAL - 6036. Eal.001.052. F. Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/evaluasi Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	52.200.000	100,00%	98,93%	0,00%	0,00%
50.	6036.EAL - 6036. Eal.001.052. E. Penilaian Sakip Eselon I	1.100.000	100,00%	99,82%	100,00%	100,00%
51.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. D. Penyusunan Laporan Apip	3.400.000	100,00%	99,76%	0,00%	0,00%
52.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. C. Penyusunan Laporan Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	3.960.000	100,00%	99,65%	100,00%	100,00%
53.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. B. Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Terkait Isu-isu Aktual Bidang Industri	109.200.000	100,00%	89,37%	100,00%	100,00%
54.	6036.EAL - 6036.eal.001.052. A. Koordinasi Analisis Dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan	66.160.000	100,00%	99,24%	96,00%	96,00%
55.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. E. Reviu Renstra	4.480.000	100,00%	59,82%	100,00%	100,00%
56.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. D. Penilaian Sakip Eselon Ii Itjen	1.760.000	100,00%	99,43%	100,00%	100,00%
57.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. C. Penyusunan Dan Reviu Lakin Itjen Dan Set Itjen	1.100.000	100,00%	99,82%	100,00%	100,00%
58.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. B. Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan, Reviu Perkin	1.100.000	100,00%	99,82%	100,00%	100,00%
59.	6036.EAL - 6036.eal.001.051. F. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	880.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		25.981.089.000	96,62%	95,63%	89,86%	89,86%

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian



Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Pilih Unit Kerja

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. Terwujudnya keefektifan dan keefisienan program kerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian													
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi *) IKU	91,5 persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	90 persen
	Pagu = Rp. 112.560.000												
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	90 Persen
	Pagu = Rp. 92.767.000												
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	8 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	0 Persen
	Pagu = Rp. 52.200.000												
	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,4 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	95%	0 Persen
	Pagu = Rp. 147.820.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 405.347.000												
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik													
	Nilai RB area penguatan pengawasan	71 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	97%	3 Persen
	Pagu = Rp. 264.164.000												
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kemenperin *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	78%	0 Level
	Pagu = Rp. 115.490.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 379.654.000												
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	1 Persen
	Pagu = Rp. 880.000												
	Capaian IACM Itjen *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%	97%	1 Level
	Pagu = Rp. 1.004.236.000												
	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0 Persen
	Pagu = Rp. 644.437.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.649.553.000												
4. Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	25 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	101%	1 Persen
	Pagu = Rp. 38.160.000												
	Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	55 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	0 Persen

Pagu = Rp. 4.400.000

Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	87%	0 Persen
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 130.088.000

Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 11.036.000

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	99%	95%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----------

Pagu = Rp. 16.600.000

Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	91 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	25%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 16.050.000

Total Pagu Sasaran = Rp. 216.334.000

5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas

Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	----------

Pagu = Rp. 9.400.000

Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	60 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	----------

Pagu = Rp. 72.200.000

Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	92 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	55%	0 Persen
--	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	-----	----------

Pagu = Rp. 4.000.000

Layanan Perkantoran	12 Layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97%	100%	0 Layanan
---------------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	------	-----------

Pagu = Rp. 23.239.001.000

Total Pagu Sasaran = Rp. 23.324.601.000

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian